

RENCANA KERJA

T.A 2025



BADAN KESBANGPOL PROV. SULSEL



PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

01

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN

02

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

03

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

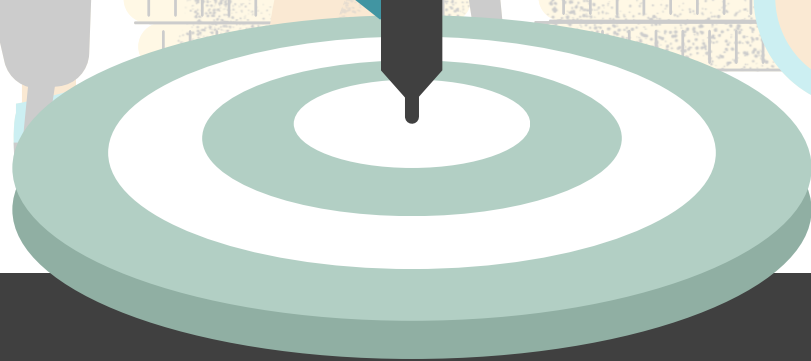
04

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

05

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

06



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 1 (Satu) tahun. Dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan 2025 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 -2026.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum dan OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlibat dalam melaksanakan tugas absolute dan konkuren.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Prinsip Good Governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Prov. Sulsel tahun 2008-2028.
13. Peraturan Daerah Prov. Sulsel No. 13 Tahun 2023 tentang RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023, tanggal 13 Februari 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Tujuan

Tercapainya tujuan dan sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 secara efektif dan efisien sesuai kebijakan, program dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan Bab yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Bab V Penutup merupakan Bab Penutup.

B A B II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel pada tahun 2023 telah melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 53,606,119,214.00- Akan Tetapi pada pertengahan Triwulan IV Telah dilakukan Perubahan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (Perubahan) Menjadi Rp. 291,069,492,613.00- Khususnya pada Anggaran Hibah Semula Rp. 41,689,211,636 Menjadi Rp. 272,205,093,665 dan sampai dengan Triwulan IV telah diperoleh tingkat capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 217,737,965,454.00- atau 74.81 dan capaian realisasi fisik 99,96%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 merupakan periode Pertama Renstra 3 (Tiga) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan 2024 – 2026 sehingga tingkat pencapaian indikator diharapkan memenuhi total pencapaian akhir periode Renstra, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel pada tahun 2024 memiliki 6 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 531.596.353.676,00-. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini memiliki 3 indikator, 8 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar rata-rata 100%, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi, sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 80% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 80%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang meliputi sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub

kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibraan dan Purnapaskibra.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh target resntra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 100% dengan

tingkat capaian akhir periode renstra 100%, dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut ;

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ketahanan Ekonomi Daerah.
Program ini memiliki 1 indikator, 1 kegiatan, dan 5 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dicapai dengan realisasi capaian sebesar 80% dalam hal ini diperkirakan bakesbangpol prov sulsel dapat memenuhi seluruh targer renstra, Program ini terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut;
 - A. Kegiatan Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan terdiri dari sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Target Renstra	Tingkat Capaian Realisasi	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	60,0	35,0	20,0	20,0	100,0		55	91,67	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .02	8.01.0 2.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	1.500,0	1.000,0	500,0	500,0	100,0		1.500	100,00	
						jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	12,0	8,0	4,0	4,0	100,0		12	100,00	
						jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)	12,0	8,0	4,0	4,0	100,0		12	100,00	
						jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang	12,0	8,0	4,0	4,0	100,0		12	100,00	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .02	8.01.0 2.1.01	8.01.02. 1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	18,0	12,0	6,0	6,0	100,0	12	30	166,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .02	8.01.0 2.1.01	8.01.02. 1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	2	5	166,67

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .02	8.01.0 2.1.01	8.01.02. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9,0		8,0	8,0	100,0	6	14	155,56
						<i>Predikat Kinerja</i>									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	82,01	94,41	82,02	83,39	101,67		178	216,80
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	6,0	4,0	2,0	2,0	100,0		6	100,00
							Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0		3	100,00
							Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0		3	100,00
							Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	300,0	350,0	100,0	150,0	150,0		500	166,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01	8.01.03. 1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
							jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01	8.01.03. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0	2,0	6,0	6,0	100,0		8	266,67
							jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6,0	3,0	7,0	7,0	100,0		10	166,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01	8.01.03. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0		100,0	100,0	100,0	100	200	6666,67
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,0		100,0	100,0	100,0	100	200	606,06
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01	8.01.03. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9,0		3,0	3,0	100,0	3	6	66,67
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9,0		3,0	3,0	100,0	3	6	66,67

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .03	8.01.0 3.1.01	8.01.03. 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	2	5	166,67
						Predikat Kinerja									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan	60,0	45,0	20,0	20,0	100,0		65	108,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04	8.01.0 4.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang Dikelola	12,0	10,0	4,0	4,0	100,0		14	116,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04	8.01.0 4.1.01	8.01.04. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberday aan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	4	7	233,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04	8.01.0 4.1.01	8.01.04. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdaya aan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,0		200,0	200,0	100,0	100	300	10000,00

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04	8.01.0 4.1.01	8.01.04. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,0	0,0	1,0	1,0	100,0	100	101	3366,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .04	8.01.0 4.1.01	8.01.04. 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
						<i>Predikat Kinerja</i>									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	20,0	78,0	20,0	20,0	0,0		98	490,00
							Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0		300	300,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05	8.01.0 5.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis	12,0	7,0	4,0	4,0	100,0		11	91,67
							Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	12,0	8,0	4,0	4,0	100,0		12	100,00
							Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12,0	9,0	4,0	4,0	100,0		13	108,33
							Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	12,0	10,0	4,0	4,0	100,0		14	116,67
							Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0		300	100,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05	8.01.0 5.1.01	8.01.05. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12,0		4,0	4,0	100,0	3	7	58,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05	8.01.0 5.1.01	8.01.05. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9,0		200,0	200,0	100,0	100	300	3333,33

8.01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05	8.01.0 5.1.01	8.01.05 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3,0		200,0	200,0	100,0	100	300	10000,00
8.01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .05	8.01.0 5.1.01	8.01.05 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9,0	6,0	3,0	3,0	100,0	3	12	133,33
					Predikat Kinerja									
8.01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	60,0	93,75	20,0	25,0	125,0		119	197,92
8.01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	36,0	29	12,0	12,0	100,0		41	113,89
						Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	36,0	24	12,0	12,0	100,0		36	100,00
						Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	300,0	237	100,0	100,0	100,0		337	112,33
						Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	12,0	8	4,0	4,0	100,0		12	100,00
						Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	12,0	8	4,0	4,0	100,0		12	100,00
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	36,0	24	12,0	12,0	100,0		36	100,00
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	12,0	8	4,0	4,0	100,0		12	100,00
						Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	12,0	8	4,0	4,0	100,0		12	100,00
						Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	12,0	8	4,0	4,0	100,0		12	100,00
						Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	6,0	4	2,0	2,0	100,0		6	100,00

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06. 1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	3	6	200,00
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	3	6	200,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06. 1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	18,0	12,0	6,0	6,0	100,0	1	19	105,56
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	18,0	12,0	6,0	6,0	100,0	1	19	105,56

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	18,0		150,0	150,0	100,0		150	833,33
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	18,0		150,0	150,0	100,0		150	833,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	24,0		4,0	4,0	100,0	15	19	79,17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	24,0		4,0	4,0	100,0	15	19	79,17

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06 1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	129,0	86,0	43,0	43,0	100,0	6	135	104,65
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150,0	100,0	50,0	50,0	100,0	6	156	104,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	8.01 .06	8.01.0 6.1.01	8.01.06 1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18,0	12,0	6,0	6,0	100,0	1	19	105,56
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	18,0	12,0	6,0	6,0	100,0	1	19	105,56
						Predikat Kinerja									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0		300	300,00
							Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0		300	300,00
							Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0		300	300,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	60,0	39,0	20,0	20,0	100,0		59	98,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6,0	4,0	2,0	3,0	150,0	2	9	150,00

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	jumlah dokumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	jumlah dokumen perubahan DPASKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinea SKPD	63,0	42,0	21,0	21,0	100,0	13	76	120,63
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 1	X.XX.01 .1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	5	8	266,67
						<i>Predikat Kinerja</i>								0	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu	60,0	40,0	20,0	20,0	100,0		60	100,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42,0	28,0	50,0	50,0	100,0	50	128	304,76
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	36,0	18,0	12,0	12,0	100,0	6	36	100,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36,0	24,0	12,0	12,0	100,0	12	48	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	36,0	3,0	1,0	1,0	100,0	2	6	16,67

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	36,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	11,11
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36,0	24,0	12,0	12,0	100,0	12	48	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 2	X.XX.01 .1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	11,11
						<i>Predikat Kinerja</i>								0	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	60,0	40,0	20,0	20,0	100,0	4	64	106,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 3	X.XX.01 .1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 3	X.XX.01 .1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33
						<i>Predikat Kinerja</i>									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja	60,0	40,0	20,0	20,0	100,0	195	255	425,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 5	X.XX.01 .1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	174,0		1,0	1,0	100,0	58	59	33,91
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 5	X.XX.01 .1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	36,0	21,0	12,0	12,0	100,0	12	45	125,00
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 5	X.XX.01 .1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36,0	24,0	12,0	12,0	100,0	12	48	133,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 5	X.XX.01 .1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0	0	0,00

						Predikat Kinerja									0	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor	60,0	40,0	20,0	20,0	100,0		60	100,00	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1	3	100,00	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6,0	2,0	1,0	1,0	100,0	2	5	83,33	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.07	Penyediaan BahanMaterial	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	30,0	10,0	1,0	1,0	100,0	10	21	70,00	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas dan Kunjungan Tamu	3,0	2,0	1,0	1,0	100,0	1	4	133,33	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96,0		1,0	1,0	100,0	40	41	42,71	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 6	X.XX.01 .1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36,0	24,0	12,0	12,0	100,0	12	48	133,33	
						Predikat Kinerja										
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,0	20,0	20,0	20,0	100,0		40	66,67	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 7	X.XX.01 .1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15,0	0,0	1,0	1,0	100,0	0	1	6,67	
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 7	X.XX.01 .1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	87,0	29,0	29,0	27,0	93,10	30	86	98,85	
						Predikat Kinerja										
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,0	20,0	20,0	20,0	100,0		40	66,67	

8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 8	X.XX.01 .1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12	36	100,00
						<i>Predikat Kinerja</i>									
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	60,0	38,0	20,0	20,0	100,0		58	96,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 9	X.XX.01 .1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18,0	46,0	23,0	23,0	100,0	26	95	527,78
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 9	X.XX.01 .1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60,0	0,0	2,0	0,0	0,0	20	20	33,33
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 9	X.XX.01 .1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,0	20,0	10,0	10,0	100,0	20	50	166,67
8	01	8.01.0.0 0.0.00.4 9.0000	X.X X.0 1	X.XX. 01.1.0 9	X.XX.01 .1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,0	0,0	1,0	1,0	100,0	1	2	200,00
						<i>Predikat Kinerja</i>									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2023. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2023, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

1. Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)**

Hingga akhir tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-5 yaitu tahun 2023. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,79
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 100

		- Nilai Temuan Material LHP yang di Selesaikan (%)	100%
--	--	--	------

2.2.1. Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

2.2.1.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN 2023
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100	100 %	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Adapun hasil capaian Untuk tahun 2023 target pada sasaran ini sebesar 100 % Jumlah Persentase Potensi konflik yang tertangani sampai dengan akhir 2023 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil mencapai realisasi capaian kinerja hasil ini didapat dari Realisasi 2023 dibagi Target capaian kinerja target dinyatakan bagus karena persentase potensi konflik yang tertangani semua dapat ditangani dengan baik. Hal ini bisa kami capai berkat koordinasi dan sinergi yang baik antara anggota Forkopimda dan Stakeholder, ini terbukti dengan keberhasilan Badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan 15 kali Rapat.

2.2.1.2 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator	satuan	Target	Realisasi				
			2022	2023	2019	2020	2021

Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100	100	100	100	80 kasus	21 Kasus
--	------------	-----	-----	-----	-----	----------	----------

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk analisis ini capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentase potensi konflik yang tertangani (2023) telah terealisasi sebesar 100 jika dibandingkan di tahun 2022 realisasi yang telah di capai juga sebesar 100 dan di tahun 2019 mendapat sebesar 100 dan di tahun 2020 berubahnya indicator menjadi jumlah Konflik sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik, mendapatkan sebesar 80 kasus dan di tahun 2020 berhasil menekan angka kasus sebesar 21 kasus dan berubahnya lagi indicator seperti table yang diatas menjadi persentase.

2.2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian
Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100 %	100 %	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan Arahan dari tim Kemenpan RB untuk merubah indicator pada Rencana Kerja (RENJA) sehingga pada analisis ini tidak dapat di analisis karena ada perbedaan indicator antara RENSTRA dan Kinerja yang dicapai.

2.2.1.4 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar nasional	Capaian
----	---------	-------------------	--------	----------------	------------------	---------

1.	Meningkatnya keamanan dan ketentaraman Masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	Persentase	100%		-
----	---	--	------------	------	--	---

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

2.2.1.5 Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI,POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.
- Melaksanakan rapat forkopimda dan kominda
- Melaksanakan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat
- Melaksanakan pertemuan dengan para fkub dan ormas di Sulawesi selatan.



Ket. Pemerintah bersinergi dengan tni dan polri dan pemukah agama



Ket. Bakesbangpol melaksanakan Rapat forkopimda Bersama seluruh Kabupaten/Kota



Ket. Bakesbangpol melaksanakan Rapat forkopimda dan forkopimcam Bersama seluruh Aparat desa

2.2.1.6 Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan ketentaraman masyarakat	100 %	82,24%	1,77%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82,24% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 1,77%.

2.2.1.7 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3,127,971,100	Rp. 2,837,374,011	90,71	100 %

2.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 463,514,200	Rp. 209,670,208	45,23	100 %
3.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1,377,813,300	Rp. 1,302,516,677	94.54	100 %
4.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 43,160,180,402	Rp. 42,501,054,676	98.47	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 4 program dan 4 kegiatan penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2023 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2023 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

2.2.2 Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

2.2.2.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2023
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	80,09	111,5

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2023 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2023 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 80,09 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 111,5, hal ini bisa tercapai berkat peran semua stecholder dan hasil dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi selatan dalam melakukan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat yang sepanjang tahun 2023.

2.2.2.2 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	2022	2023	2019	2020	2021
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	74,85	80,09	70.88	70,58	73,43

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2022 sebesar 74,85 dan realisasi 2023 sebesar 80,09 dan di tahun 2019 70.88 dan di tahun 2020 sebesar 70.58 dan di tahun 2021 73.43 dari tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan nilai IDI dari tahun sebelumnya bahkan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara tahun 2022 dan 2023 ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

2.2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	80,09	111,5

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2023 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 80,09 dengan ini bahwa sulsel sudah melewati target yang di tentukan yang artinya target tersebut tercapai sebesar 111,5.

3.2.2.4. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	80,09	80,41	100,3%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 80,09 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 80,41, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 100,3% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

3.2.2.5. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota
- Tersaluranya bantuan keuangan parpol sehingga dapat membuat kegiatan Pendidikan politik dan pembinaan kepada masyarakat
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait Pendidikan politik



Pj gubernur Bersama badan kesatuan bangsa danpolitik melaksanakan rapat dan peninjauan langsung ke KPU.



Pj Gubernur Sulawesi Selatan Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersamaan Kejaksaan, Bawaslu , dan Staff Ahli Kemenpolhukam



Pj Gubernur Sulawesi Selatan Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Penyelenggara Pemilu.

3.2.2.6. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan.	111,5%	69,73%	4,17 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 69,73% dengan capaian kinerja sebesar 111,5% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 4,17%

3.2.2.7 Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan	Rp. 230,103,971,449	Rp.160,458,910,564	69,73 %	111,5 %

dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
---	---	--	--	--	--

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 1 Kegiatan yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 160,458,910,564 atau 69,73%, dengan tingkat capaian kinerja 111,5% sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

3.2.3 Sasaran strategisMeningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

3.2.3.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2023

Nilai SAKIP OPD	100	75,75	75,75
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP yang terselesaikan	100 %	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2023 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Indikator ke 4 yaitu temuan material LHP pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2023 memperoleh target sebesar 100%.

3.2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi				
			2022	2023	2021	2020	2019
1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	95	75.00	75,75	74,05	73,3	70,70
2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	8 100 %	90%

(Evaluasi Dokumen (Perencanaan)							
3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%	100%		95%
4. Temuan Material Lhp		100%	100%	100%	100%	100 %	-
						-	

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2023 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%. Dan di tahun sebelumnya pada tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 75.00 kemudian ditahun 2021 mendapatkan point sebesar 74,05 selanjutnya di tahun 2020 mendapatkan point sebesar 73,38 dan di tahun 2019 mendapatkan point sebesar 70,70 disini kita dapat melihat terjadi peningkatan setiap tahunnya, jadi badan kesatuan bangsa dan politik berhasil meningkatkan nilai sakip setiap tahun.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% dan di tahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 mendapatkan sebesar 100% selanjutnya di tahun 2020 mendapatkan sebesar 100% dan di tahun 2019 mendapatkan sebesar 90%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100% dan di

tahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 sebesar 100% kemudian di tahun 2020 sebesar 100% dan ditahun 2019 mendapatkan sebesar 95%.

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100% dan ditahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 sebesar 100 % dan di tahun 2019 sampai dengan 2020 belum adanya indicator yang ditambahkan oleh mentor menpan rb pada saat itu.

3.2.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	75,75	75,75
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan	Persentase	100%	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100%
Temuan material LHP yang terselesaikan	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2022 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra

sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indikator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

3.2.3.4. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp yang terselesaikan	Persentase	75,75 100 100 100		

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

3.2.3.5. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkcmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.
- Dengan adanya sosialisasi terkait peningkatan ASN dalam menyusun SKP di Badan Kesatuan Bangsa dan politik dan melakukan kolaborasi dengan BKD



3.2.3.6. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	81,24	1,87%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 81,24 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 1,87%.

3.2.3.7. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12,836,042,162	Rp. 10,428,439,318	81,24 %	100 %

		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program dan 8 kegiatan untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan sebesar 81,24 dan tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 291.069.492.613 dengan realisasi sebesar Rp. 217.737.965.454 (74.81%),

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	53.236.563.214	290.563.226.113	237.326.662.899	545%
Belanja Operasi	53.236.563.214	290.563.226.113	237.326.662.899	545%
Belanja Modal	369.556.000	506.266.500	136.710.500	136%

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi **Rp 217.737.965.454,-** atau **74.81 %** dari jumlah

alokasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 291.069.492.613** Dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **63,907,517,662,-** atau **97.37 %** maka tahun ini terjadi Penurunan realisasi capaian keuangan dikarenakan Adanya anggaran Hibah Yang belum terealisasi Pada dokumen anggaran perubahan pada badan kesatuan bangsa dan politik, Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Bakesbangpol Prov. Sulsel disajikan sebagai berikut;

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Potensi Konflik yang tertangani			100				125				
2	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel			71.79				80,09				
3	Nilai Sakip OPD			100				75,75				
	Persentase Capaian Kinerja Program Prangkat Daerah			100				98				
	Nilai Temuan Material Temuan LHP yang diselesaikan			100				100				
1	Persentase Potensi Ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan yang tertangani				100	100	100			100	100	
2	Jumlah Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terdeteksi				15	20	25			20	25	
3	Persentase peserta yang hadir pada Pendidikan Ideologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa				75	80	85			80	85	
4	Nilai sakip OPD				75	78	80			78	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional serta penjabaran teknis dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 harus fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati Bersama, dalam Renstra 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan isu strategis yaitu Sulsel aman, damai dan demokratis dari beberapa pertimbangan yang di telaah seperti Aspek Permasalahan dalam Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, permasalahan dalam bidang politik dalam negeri, permasalahan dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi, permasalahan dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, hal ini juga berdasarkan Undang – Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, absolute dan kongkuren.

Setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, juga dalam proses penyusunan, akan tetapi diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap mengacu pada Program Prioritas sesuai surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum no. 910/964/Polpum tanggal 8 february 2022, tentang dukungan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah antara lain:

1. Kerukunan Umat Beragama di Daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah;
4. Penghayatan dan Pengalaman Nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dibidang Kewaspadaan dini dan deteksi dini;
6. Tim terpadu penanganan konflik social (PKS) daerah yang efektif;
7. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;

8. Pendidikan politik masyarakat di Daerah;
9. Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus partai politik;
10. Fasilitas penguatan demokrasi di Daerah;
11. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
12. Pembinaan dan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
13. Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika (P4GN dan PN);
14. Peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di Wilayah kerja masing-masing;
15. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Sedangkan pada Sasaran Renstra Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan terdapat beberapa point yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa
3. Meningkatnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat
4. Tertanamkannya nilai – nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan partai politik
5. Membangun system dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik daerah
6. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat
7. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis.

Dari sasaran kementerian dan rangkuman sasaran kabupaten / kota diatas terdapat sejumlah kesamaan sesuai dengan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik diantaranya terciptanya kesatuan bangsa di masyarakat baik dari segi politik, beragama dan bermasyarakat sehingga menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram di masyarakat, sehingga dalam penyusunan program kerja ataupun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kabupaten kota dapat selaras dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal inilah yang merupakan tujuan kita bersama bahkan bukan hanya untuk badan kesatuan bangsa dan politik saja akan tetapi merupakan tujuan dari berbagai aspek dan sendi kehidupan di negeri ini.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari permasalahan baik dari internal maupun external yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas sehingga potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap stabilitas daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dalam hambatan dan permasalahan seperti :

- ❖ Permasalahan dalam Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
 1. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan–jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah.
 2. Masih ada nya penggunaan cara– cara penyampaian pendapat yang mengabaikan / melecehkan symbol–symbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
 3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
 4. Meningkatnya paham radikalisme ditengah masyarakat
- ❖ Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri
 1. Terdapatnya gejala politisasi nilai–nilai agama dan kepercayaan.
 2. Belum optimalnya organisasi parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat
- ❖ Permasalahan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi
 1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitasharga komoditas pangan.
 2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin
- ❖ Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPELEKSOSBUDHUKAM.
2. Transformasi teknologi industri dan komunikasi

Setelah diadakan analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri, sasaran jangka menengah Renstra Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan dan sejumlah permasalahan dan hambatan yang timbul dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah di dapat sejumlah isu – isu penting dan merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk jangka lima tahun ke depan diantaranya adalah tergambar dalam table berikut:

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	1. Menguatnya sikap primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putera daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah 2. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan simbol-simbol Negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih	Kualitas Keamanan, Perdamaian dan demokrasi harus selalu berada di zona hijau		Sulsel aman, damai dan demokratis

		adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum 3. Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan 4. Meningkatnya paham radikalisme di tengah masyarakat			
2.	Permasalahan dalam Bidang POLITIK DALAM NEGERI	1. Terdapatnya gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan 2. Belum optimalnya organisasi parpol dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat			
3.	Permasalahan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi	1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitas harga komoditas pangan. 2. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan			

		perkotaan, golongan umur dan jenis kelamin Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta instabilitasharga komoditas pangan 3. Masih tingginya ketimpangan antar masyarakat dan antara daerah pedesaan dan perkotaan golongan umur dan jenis kelamin			
4.	Permasalahan Dalam Bidang Kewaspadaa N Nasional Dan Penanganan Konflik	1. Terdapatnya potensi konflik vertikal dan horizontal dari aspek IPOLEKSOSBU DHUKAM 2. Tranformasi teknologi industry dan komunikasi			

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan penyusunan rancangan akhir rencana kerja (Renja) 2025 Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tidak menerima usulan baik melalui SIPD maupun secara langsung.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang dibawah koordinasi ditjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum no. 910/964/Polpum tanggal 8 february 2022, tentang dukungan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka untuk mencapai, memenuhi amanat diatas, prioritas pembangunan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka dalam Renstra Bakesbangpol 2024-2026 telah ditetapkan ***tujuan pembangunan*** daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.

Berdasarkan tujuan jangka menengah tersebut maka ditetapkan tujuan renja 2025 sama dengan yang tertuang dalam Renstra.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan baik tujuan jangka menengah maupun tujuan renja tahun 2025 maka telah ditetapkan ***sasaran*** yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Deteksi terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Idiologi Pancasila, Politik dan Karakter Bangsa.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menyusun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol tahun 2025 merujuk pada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang perubahan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Renstra Bakesbangpol Prov. Sulsel 2024-2026, terdapat perbedaan antara permedagri 13 yang merupakan pedoman penyusunan terdahulu dibandingkan dengan permendagri 90 terutama dari segi prinsip dasar, pada permendagri 90 yang dipakai saat ini kita tidak diberi ruang untuk membuat sendiri nama program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi hanya bisa memilih dari daftar yang sudah ada, bahkan indikator sub kegiatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang perubahan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain itu dalam memilih program, kegiatan dan sub kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi, Selain itu dalam Menyusun (RENJA) OPD atau Bakesbangpol harus berpedoman pada Renstra OPD 2024 – 2026 dan RPD Provinsi dimana didalam RPD Provinsi tidak memuat visi dan misi kepala daerah tetapi hanya memuat tujuan dan sasaran RPD Provinsi dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diminta untuk mensuport Tujuan RPD “Mengoptimalkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel” dengan “Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan permendagri 86 tahun 2017 seperti SDG’S, NSPK dan SPM khusus untuk badan kesatuan bangsa dan politik prov. Sulsel kami tidak memiliki target dari pemerintah pusat.

Berdasarkan metode diatas badan kesatuan bangsa dan politik mengajukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 Kegiatan dan 72 Sub kegiatan. Sebagaimana terlampir pada Tabel. T-C.33:

Tabel. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	87.05% 91.47 Nilai 101.43 Nilai			100.92 Nilai 83.18 % 87.11 Nilai	11.777.859.809,00						87.05% 91.47 Nilai 101.43 Nilai	11.111.412.349,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen			24 Dokumen	467.556.872,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	24 Dokumen	241.882.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	306.983.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	179.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	39.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.485.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	8.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	10.743.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	8.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	6.402.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	8.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	4.442.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan			13 Laporan	67.548.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	13 Laporan	5.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	27.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Laporan	33.553.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89 Laporan			87 Laporan	7.375.282.144,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	89 Laporan	7.134.694.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan			52 Orang/ Bulan	7.154.047.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	54 Orang/ Bulan	6.953.410.349,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen			6 Dokumen	43.038.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	32.581.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	95.907.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	11.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	2.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	4.169.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			1 Dokumen	1.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	2.165.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	77.938.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	118.969.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	11.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola Oleh Perangkat Daerah	4 Barang			4 Barang	67.540.800,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	4 Barang	56.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	46.470.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	33.821.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	20.002.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	21.894.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195 Laporan			195 Laporan	287.531.636,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	195 Laporan	183.823.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit			1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket			58 Paket	81.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	58 Paket	94.456.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	57.165.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	28.936.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			12 Dokumen	91.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	1.837.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang			1 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			1 Orang	53.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Orang	54.254.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			100 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang			10 Orang	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Orang	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen Jumlah Laporan Jumlah Paket</i>	43 Dokumen 41 Laporan 26 Paket			43 Dokumen 41 Laporan 26 Paket	1.943.616.668,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	43 Dokumen 41 Laporan 26 Paket	1.010.325.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	39.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	44.622.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	10 Paket			10 Paket	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	133.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaran n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	2 Paket	136.058.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaran n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	40.565.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaran n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	21.485.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	212.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaran n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	250.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			40 Laporan	1.478.521.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaran n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	40 Laporan	551.457.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	34.622.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	2.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Paket Jumlah Unit</i>	42 Unit 10 Paket			10 Paket 42 Unit	260.689.350,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	42 Unit 10 Paket	387.977.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.068.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Paket			10 Paket	101.455.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	10 Paket	194.477.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	30 Unit			30 Unit	154.961.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	30 Unit	189.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit			5 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit			5 Unit	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	5 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	224 Laporan			224 Laporan	772.426.839,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	224 Laporan	1.215.509.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	200 Laporan			200 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	200 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	770.290.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	1.213.339.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	69 Unit			69 Unit	603.215.500,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	69 Unit	880.402.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit			26 Unit	385.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	26 Unit	649.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelthara	20 Unit			20 Unit	8.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	9.030.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelthara	20 Unit			20 Unit	143.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	20 Unit	59.679.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0008		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asef Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit			1 Unit	1.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	63.690.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	160.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	1.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	1.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Peserta yang Hadir Pada Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa</i>	80 %			80 %	1.496.900.088,00						80 %	8.175.787.000,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan ideologi pancasila Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan karakter bangsa</i>	80 % 80 %			80 % 80 %	1.496.900.088,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	80 % 80 %	8.175.787.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	219.154.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	137.766.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	6.148.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26 Orang			7 Orang	45.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	8 Orang	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan			12 Laporan	12.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	78.508.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01.0008		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	14 Dokumen			13 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14 Dokumen	1.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat	85 %			85 %	26.808.563.627,00						85 %	8.049.520.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kolembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peserta yang hadir pada pendidikan Politik kepada masyarakat	85 %			85 %	26.808.563.627,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	85 %	8.049.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen				2 Dokumen	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	5.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen				3 Dokumen	108.463.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	113.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang				100 Orang	26.425.599.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	7.833.556.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Orang				6 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Orang	30.739.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyuluhan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan			3 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Laporan	66.219.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan instansi Terkait dibidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas	100 %			100 %	1.374.702.448,00						100 %	115.419.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dibidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	50 Kali 50 Kali			50 Kali 50 Kali	1.374.702.448,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50 Kali 50 Kali	115.419.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	4 Dokumen	35.205.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang			100 Orang	949.990.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	33.121.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	100 Orang			100 Orang	33.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	25.571.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	1 Laporan			1 Laporan	41.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	21.522.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya</i>	100 %			100 %	1.282.078.236,00						100 %	1.495.548.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan Organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya</i>	2 kali 2 Kali			2 Kali 2 kali	1.282.078.236,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 kali 2 Kali	1.495.548.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.1.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	8.508.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	62.981.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.1.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	100 Orang			100 Orang	1.154.606.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	1.341.267.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang			100 Orang	63.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 Orang	51.144.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan			3 Laporan	55.419.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Laporan	40.156.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentukun Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda	100 %			100 %	31.303.993.782,00						100 %	33.224.673.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi dan sinergi dengan tim bentukun pemerintah di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial Jumlah kordinasi dan sinergi dengan forkopimda	12 Kali 6 Kali			6 Kali 12 Kali	31.303.993.782,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Kali 6 Kali	33.224.673.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 Dokumen			6 Dokumen	29.732.489.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	6 Dokumen	29.436.859.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	42.008.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggarae n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	2 Dokumen	1.142.571.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kowaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang			30 Orang	79.495.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggarae n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	30 Orang	546.972.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggarae n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	430.837.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggarae n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	1.667.434.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H					74.044.097.990,00							62.172.359.349,00	

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rancangan Akhir Renja sebagaimana terlampir.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan berbagai kebutuhan Barang dan Jasa kantor termasuk barang modal/asset serta dukungan administrasi perjalanan dinas, program ini memiliki 3 indikator yaitu Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%), Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program (%), Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%). Terdapat 8 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.11.777.859.809,00,- dengan rincian Sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - B. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - E. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - G. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - B. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - C. Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
 - D. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
 - E. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - F. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - G. Sub kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - B. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - C. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - B. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - C. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - D. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - E. Sub kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - F. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - G. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - H. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - B. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - C. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - D. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - E. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - F. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
 - G. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - H. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - I. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - B. Sub kegiatan Pengadaan Mebel;
 - C. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - D. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - E. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - F. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - C. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - B. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - C. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - D. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - E. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - F. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan memiliki 1 indikator yaitu: Persentase Peserta Yang Hadir Pada Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.1.496.900.088,00- sebagai berikut :
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - B. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - E. Sub kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada program ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase terlaksananya Pendidikan Politik kepada masyarakat dan terdapat 1 kegiatan dan 5 Sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.26.808.563.627,00,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - A. sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - B. sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - C. sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - D. sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - E. sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 indikator yaitu Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi dengan Instansi Terkait dibidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat dan Orkemas,

program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.1.374.702.448,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- A. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- B. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

V. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, program ini memiliki 1 indikator yaitu % persentase terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan organisasi bentukan pemerintah di bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp.1.282.078.236,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- A. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- B. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan 1 indikator Persentase terlaksananya Koordinasi dan sinergi Dengan Tim Bentuk Pemerintah di bidang Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Forkopimda. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yang anggarannya direncanakan akan didanai oleh APBD Prov. Sulsel sebesar Rp. 31.303.993.782,00,-dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang meliputi:
 - A. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - B. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - C. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - D. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah,
 - E. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dalam Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 ini pendanaan yang tertera diatas masih pagu indikatif, sehingga pencapaian indikatornya pun sesuai dengan pagu tersebut, apabila pagu indikatifnya tidak sama apalagi dibawahnya ada kemungkinan pencapaian indikator akan menurun.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pada renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 khususnya dari segi pendanaan bisa terpenuhi 100% sesuai pagu indikatif, diharapkan bisa memenuhi seluruh target indikator yang ada, apabila tidak, kemungkinan pencapaian target indikator juga mengalami penurunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Bakesbangpol akan berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan BPKAD untuk rencana pendanaan.

Makassar, 2024

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROV. SULSEL


ANSYAR, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 1979205 199810 1 002

LAMPIRAN

